

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pertumbuhan dunia industri yang terus meningkat memiliki dampak terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th.XVII, 3 Februari 2014, pertumbuhan produksi industri besar dan sedang naik 0,13% dan industri manufaktur kecil dan mikro naik 5,18% pada triwulan IV-2013 terhadap triwulan IV-2012 (Badan Pusat Statistik, 2014). Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami pertumbuhan produksi manufaktur pada sektor industri kecil-mikro sebesar 12,35% pada tahun 2013, industri pakaian jadi/garmen menyumbang 8,52% dari pertumbuhan produksi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta (Badan Pusat Statistik, 2014).

Saat ini (2013) Indonesia masuk dalam jajaran 10 besar pengekspor pakaian terbesar dunia, pada tahun 2011 Indonesia merupakan negara pengekspor tekstil dan pakaian jadi terbesar ke-11 di dunia (Birry et al., 2013). Berkembangnya industri garmen di Indonesia mempengaruhi Indonesia dari sisi lingkungan hidup. Oleh karena itu, perlu perhatian khusus dalam menanggapi dampak-dampak yang mungkin terjadi pada lingkungan hidup akibat dari pembangunan industri garmen di Indonesia khususnya di Yogyakarta.

Proses pembangunan dan perkembangan sebuah industri dapat menyebabkan pencemaran lingkungan yang akan berdampak negatif bagi kesehatan alam, oleh karena itu perlu manajemen dan kelola lingkungan hidup yang baik sehingga tidak akan mempengaruhi ekosistem yang tinggal di dalamnya. Sebuah industri yang berwawasan lingkungan hidup harus melakukan studi kelayakan mengenai lingkungan hidup yang menyelaraskan pertumbuhan dengan kelestarian lingkungan hidup, mengutamakan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya alam serta berguna bagi masyarakat (Darsono, 2013).

Sebuah organisasi baru atau yang sudah berjalan perlu memiliki dokumen yang mengatur kebijakan lingkungan, kebijakan lingkungan adalah pernyataan dari tujuan keseluruhan organisasi dan prinsip-prinsip tindakan sehubungan dengan lingkungan, termasuk kepatuhan terhadap semua persyaratan peraturan yang relevan (Sturm & Upasena, 1998).

CV. Evergreen Buana Prima Sandang merupakan industri garmen yang akan dibangun di Desa Purwomartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, perusahaan ini belum memiliki manajemen lingkungan hidup. Dalam menyusun manajemen lingkungan hidup suatu badan usaha dan/atau kegiatan agar mendapatkan izin lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.27 tahun 2012, bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2012). Menurut Keputusan Bupati Sleman No.17/Kep.KDH/2004 bahwa industri aneka tenun/pertenunan termasuk garmen di dalamnya wajib dilengkapi dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) (Bupati Sleman, 2004). UKL-UPL diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2012).

## **1.2. Perumusan Masalah**

Pembangunan dan pemanfaatan industri garmen (CV.Evergreen Buana Prima Sandang) di Desa Purwomartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki dokumen yang mengatur tentang kebijakan lingkungan dan manajemen lingkungan hidup serta belum ada identifikasi dampak negatif terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan dari aktivitas usaha ini.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Merencanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup pada industri garmen (CV. Evergreen Buana Prima Sandang) yang akan dibangun di Desa Purwomartani, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga dapat menyusun manajemen lingkungan hidup yang disetujui oleh Permrakarsa, Masyarakat, dan Pemerintah.

## **1.4. Batasan Masalah**

- a. Data yang digunakan sesuai dengan dokumen UKL-UPL yang telah disetujui oleh Pemrakarsa, Masyarakat, dan Pemerintah.
- b. Manajemen lingkungan hidup yang dilaksanakan sebagai syarat yang harus dilakukan berdasarkan peraturan pemerintah pusat dan daerah.